

EFEKТИFITAS PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

DI ERA OTONOMI DAERAH

(Studi pada Pemerintah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Disusun oleh:

RINDHY UMAYASARI
NIM 0510310110



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2009

MOTTO

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan).
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan
hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap
(QS. An Nasr : 6)*

*“...Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya
akan Ku-perkenankan bagimu...”
(Al- Mu'min : 60)*

*Bercita-citalah selagi kita masih hidup.
Berjuanglah selagi kita masih mampu,
Bermimpilah karena itu irama kehidupan
Menjadi indah dan dinamis
(anonymous)*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL

: EFEKTIFITAS PENATAAN KELEMBAGAAN
DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kota Batu)

Disusun Oleh

: RINDHY UMAYASARI

NIM

: 0510310110

Fakultas

: ILMU ADMINISTRASI

Jurusan

: ADMNISTRASI PUBLIK

Konsentrasi

: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Malang, 22 Juli 2009

Ketua

Dr. Bambang Suprivono, MS
NIP. 131 573 954

Komisi Pembimbing

Anggota

Drs. Suwondo, M.S
NIP. 130 890 050

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Juli 2009
Jam : 08.00-09.00 WIB
Skripsi atas nama : Rindhy Umayasari
Judul : Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah Di Era
Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota
Batu)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Dr. Bambang Supriyono, M.S
Ketua

Drs. Suwondo, M.S
Anggota

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
Anggota

Drs. Siswidiyanto, M.S
Anggota



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang 22 juli 2009

Mahasiswa

Materai
Rp.
6000

Nama : Rindhy Umayasari
NIM : 0510310110

RINGKASAN

Rindhy Umayasari, Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Batu), Dr. Bambang Supriyono, MS, Drs. Suwondo, M.S, 107 hal + xvi

Penerapan otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 telah membawa harapan bagi banyak pihak, baik masyarakat maupun birokrasi di daerah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom yang mengacu pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya perubahan status tersebut, membawa dampak terhadap berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya adalah dampak terhadap Penataan Kelembagaan di daerah yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Oleh karenanya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penataan kelembagaan daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan daerah dapat meningkatkan efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah.

Bagaimanakah efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah pada pemerintah Kota Batu? Deskripsi dan analisis untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan bagian penting dalam penelitian ini

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah :1. Tipe besaran perangkat organisasi daerah, 2. Unsur-unsur kelembagaan daerah, yang terdiri dari : a). Unsur Pimpinan (*The Strategic Apex*), b). Unsur Pembantu Pimpinan (*The Middle Line*), c). Lembaga Teknis Daerah (*The Technostructure*), d). Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (*The Operating Core*), e). Unsur Pembantu atau Pendukung (*The Support Staff*), 3. Penataan struktur organisasi masing-masing lembaga daerah, 4. Tugas Pokok dan fungsi masing-masing lembaga daerah.

Dalam penataan besaran kelembagaan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan melihat perhitungan jumlah variable yang telah dimiliki oleh Kota Batu maka skor yang diperoleh adalah sebesar 54 dengan koalisi menengah tipe B, dengan ketentuan jumlah besaran perangkat daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Kota Batu memiliki Sekretaris Daerah dengan 2 Asisten, sekretaris DPRD, Lembaga Teknis Daerah sebanyak 7 Satker, Dinas Daerah sebanyak 11 Satker, 3 Kecamatan, dan 4 Kelurahan.

Penetapan struktur organisasi kelembagaan daerah Kota Batu disesuaikan pada kebutuhan dan kemampuan Kota Batu, dengan tujuan mewujudkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu juga

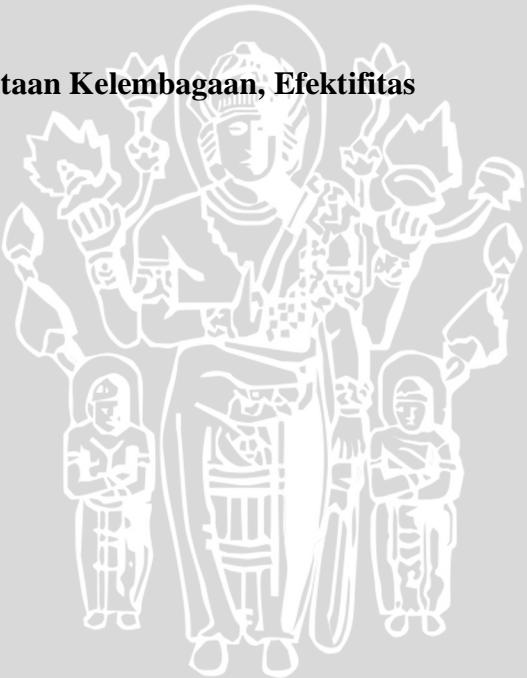


mencakup penataan fungsi dengan menempatkan tugas pokok dan fungsi pada tiap-tiap bagian organisasi perangkat daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota dan DPRD Kota Batu.

Efektifitas penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu belum dapat dikatakan efektif berdasarkan pada peraturan yang menjadi pedoman dalam pembentukan kelembagaan daerah. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya unsur perangkat daerah yang tidak terdapat pada peraturan tersebut tetapi pada kenyataannya masih ada di pemerintah Kota Batu.

Penataan kelembagaan daerah di era otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu hendaknya dikaji menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Baik dalam hal penataan struktur maupun fungsi agar lebih efektif dan jangan berhenti sampai disini, perlu adanya penyesuaian kembali, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan agar diperoleh hasil yang maksimal sehingga efisiensi dan efektifitas lembaga tercapai.

KATA KUNCI : Penataan Kelembagaan, Efektifitas



SUMMARY

Rindhy Umayasari, Effectivity Settlement of Institutional Area in Autonomous Era of Area (Study At Government Of Batu City), Dr. Bambang Supriyono, MS, Drs. Suwondo, M.S, 107 matter + xvi

Applying of area autonomy which have been raised since year 1999 bringing expectation for many side, good of bureaucracy and also society in area to make its area become otonomous area which relate at Law number 32 year 2004 about Governance of Area. With existence of change of status, bringing impact to matters which concerning management of governance of area among others is impact to Settlement of Institute in area which must be adapted for by ability and requirement of area. For the reason releasing of Regulation of Government of number 41 year 2007 about Local Bureaucracy Organization as guidance in settlement of institute of area. Released of Regulation of the Government expected by area can improve effectivity settlement of institute of area in autonomous era of area

How effectivity settlement of institute of area in autonomous era of area at government of to Batu City. Analysis and description to answer the question represent important shares in this research.

The method this research used approach qualitative method. Pursuant to formulation problem and research target, so this research focus is : 1. type of size organizational local bureaucracy of area 2. Elements institute of area, what consist of : a). Element Head (The Strategic Apex), b). Ministrant Element of Head (The Middle Line), c). Technical Institute of Area (The Technostructure), d). Element Executor Of Local Government (The Opeating Core), e). Ministrant Element or Supporter (The Support Staff) 3. Settlement of organization chart of each area institute 4. Fundamental Duty and evacuate the each area institute

In settlement of size institute of area relate at Regulation of Government of number 41 year 2007 about Organization Peripheral of Area seen tally of variable which have been owned by Batu City hence score the obtained is equal to 54 with middle coalition of type of B, with rule amount of size local bureaucracy of area which have been specified by Regulation of Government. Batu City of has Secretary Area by 2 Assistant, secretary of DPRD, Technical Institute of Area counted 7 Satker, On duty Area counted 11 Satker, 3 District, and 4 Sub-District.

Stipulating of organizational structure institute in Batu City area accomodated by requirement and ability in there, with a purpose to realize organization to poor structure and rich function which finally can improve the quality of organizational performance, local bureaucracy which is accountable and give better service to society. Besides also include cover settlement of function by placing fundamental duty and function at every part of organization local bureaucracy which is contained at Law which have been specified by Mayor Batu.

Effectivity settlement of institute of area in autonomous era of area which have been conducted by government of Batu City not yet earned to be told effective pursuant to regulation becoming guidance in forming of institute of area. This matter because of that still there are element him local bureaucracy which not there are at the regulation but practically there is still in government and DPRD of Batu City.

Settlement institute of area in autonomous era of area conducted by government of Batu city shall study by concerning about things related to service to society. Whether in the case of settlement of function and also structure to be more effective and don't desist until here, need the existence of adjustment return, to be done step by step and continual to be obtained result of maximal so that and efficiency of efectivity tired institute.

KEY WORDS : Settlement Institusional, Effectivity



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb



Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho dan hidayah-Nya akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Batu)“**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penelitian skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materiil.
2. Bapak Dr. Bambang Supriyono, MS selaku ketua pembimbing dan Bapak Drs. Suwondo, M.S selaku anggota pembimbing yang telah sabar dan menyempatkan waktu padatnya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
3. Bapak. Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak. Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Arief Rachman Ardyasana, S.STP selaku Kasubag Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu, dan

seluruh Pegawai Bagian Organisasi Pemerintah Kota Batu yang telah meluangkan waktu untuk membantu terselesaikannya penelitian ini.

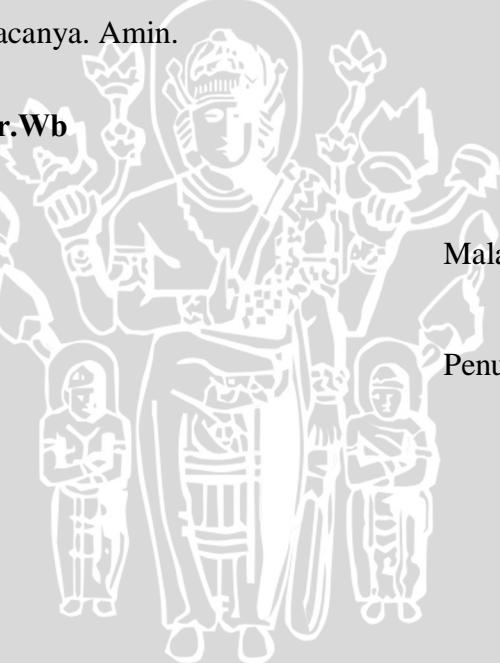
6. Teman-teman FIA Publik'05, khususnya kelas D maupun kelas E, dan kelas B konsentrasi Pemda, serta semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik kalian semua.

Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Walaupun telah dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih perlu adanya koreksi, saran, dan kritikan yang konstruktif dan sifatnya membangun agar dapat berhasil dalam penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Juli 2009

Penulis.



DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO**TANDA PERSETUJUAN****TANDA PENGESAHAN****PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI****RINGKASAN.....**

v

SUMMARY.....

vii

KATA PENGANTAR.....

ix

DAFTAR ISI

xi

DAFTAR TABEL.....

xiv

DAFTAR GAMBAR.....

xv

DAFTAR LAMPIRAN.....

xvi

BAB I**: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6

BAB II**: KAJIAN PUSTAKA**

A. Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	7
2. Peran dan Model Peran Pemerintah Daerah	9
B. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
1. Desentralisasi.....	10
2. Otonomi Daerah	
1. Definisi Otonomi Daerah.....	14
2. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah....	15
3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.....	17
C. Kelembagaan Daerah	
1. Pengertian Lembaga.....	18
2. Struktur Lembaga Daerah.....	20
3. Penataan Kelembagaan Daerah.....	25
D. Efektifitas Kelembagaan Daerah.....	31

BAB III**: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Analisa Data.....	38

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu	
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	40
2. Keadaan Topografi dan Klimatologi.....	41
3. Keadaan Geologi dan Hidrologi.....	41
4. Pola Penggunaan Tanah.....	42
5. Penduduk dan SDM.....	42
6. Kondisi Fasilitas Pelayanan Umum.....	43
7. Utilitas.....	46
8. Jaringan Transportasi.....	47
9. Kondisi Ekonomi.....	48
10. Kondisi Hukum, Keamanan dan Ketertiban	48
11. Kondisi Sosial-Budaya.....	49
B. Penyajian Data	
Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah	
1. Tipe Besaran Perangkat Organisasi Daerah Kota Batu.....	49
2. Unsur-Unsur Kelembagaan Daerah Kota Batu	
a. Unsur Pimpinan (<i>The Strategic Apex</i>)	51
b. Unsur Pembantu Pimpinan (<i>The Middle Line</i>)	53
c. Lembaga Teknis Daerah (<i>The Tecnostructure</i>)	55
d. Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (<i>The Operating Core</i>).....	57
e. Unsur Pembantu atau Pendukung (<i>The Support Staff</i>).....	60
3. Penataan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah Kota Batu.....	61
4. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Lembaga Daerah.....	79
C. Analisis dan Interpretasi Data	
Efektifitas Penataan Kelembagaan Daerah	
1. Tipe Besaran Perangkat Organisasi Daerah Kota Batu.....	90
2. Unsur-Unsur Kelembagaan Daerah Kota Batu	
a. Unsur Pimpinan (<i>The Strategic Apex</i>)	94
b. Unsur Pembantu Pimpinan (<i>The Middle Line</i>)	95
c. Lembaga Teknis Daerah (<i>The Tecnostructure</i>)	96
d. Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (<i>The Operating Core</i>).....	96
e. Unsur Pembantu atau Pendukung (<i>The Support Staff</i>).....	97
3. Penataan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah Kota Batu.....	99
4. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Lembaga Daerah.....	101

BAB V

: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bagian Pokok Institusi Pemerintahan Daerah	25
2. Batas Wilayah Kota Batu	40
3. Jenis Tanah dan Ketinggian	41
4. Tata Guna Tanah	42
5. Jumlah Penduduk	42
6. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	43
7. Jumlah Lembaga Pendidikan	44
8. Jumlah Sarana Kesehatan	45
9. Variabel Besaran Organisasi	50
10. Penetapan Besaran Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah untuk Daerah Kota	91
11. Variabel Besaran Perangkat Daerah	92
12. Besaran Perangkat Daerah	93



DAFTAR GAMBAR

1. The Five Basic Part of Organization
2. Empat Alur Kegiatan dalam Analisa Data Kualitatif

Halaman

23

39



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Wawancara	109
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	110
3. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah	111
4. Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD	112
5. Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan	113
6. Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan	114
7. Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Sosial dan Tenaga Kerja	115
8. Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	116
9. Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	117
10. Bagan susunan organisasi Dinas Pengairan dan Bina Marga	118
11. Bagan susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	119
12. Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	120
13. Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	121
14. Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan	122
15. Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	123
16. Bagan susunan organisasi Kecamatan	124
17. Bagan susunan organisasi Kelurahan	125
18. Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	126
19. Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah	127
20. Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	128
21. Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	129
22. Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup	130
23. Bagan susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Kearsipan Dan Dokumentasi	131
24. Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	132
25. Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	133
26. Daftar Riwayat Hidup	134

